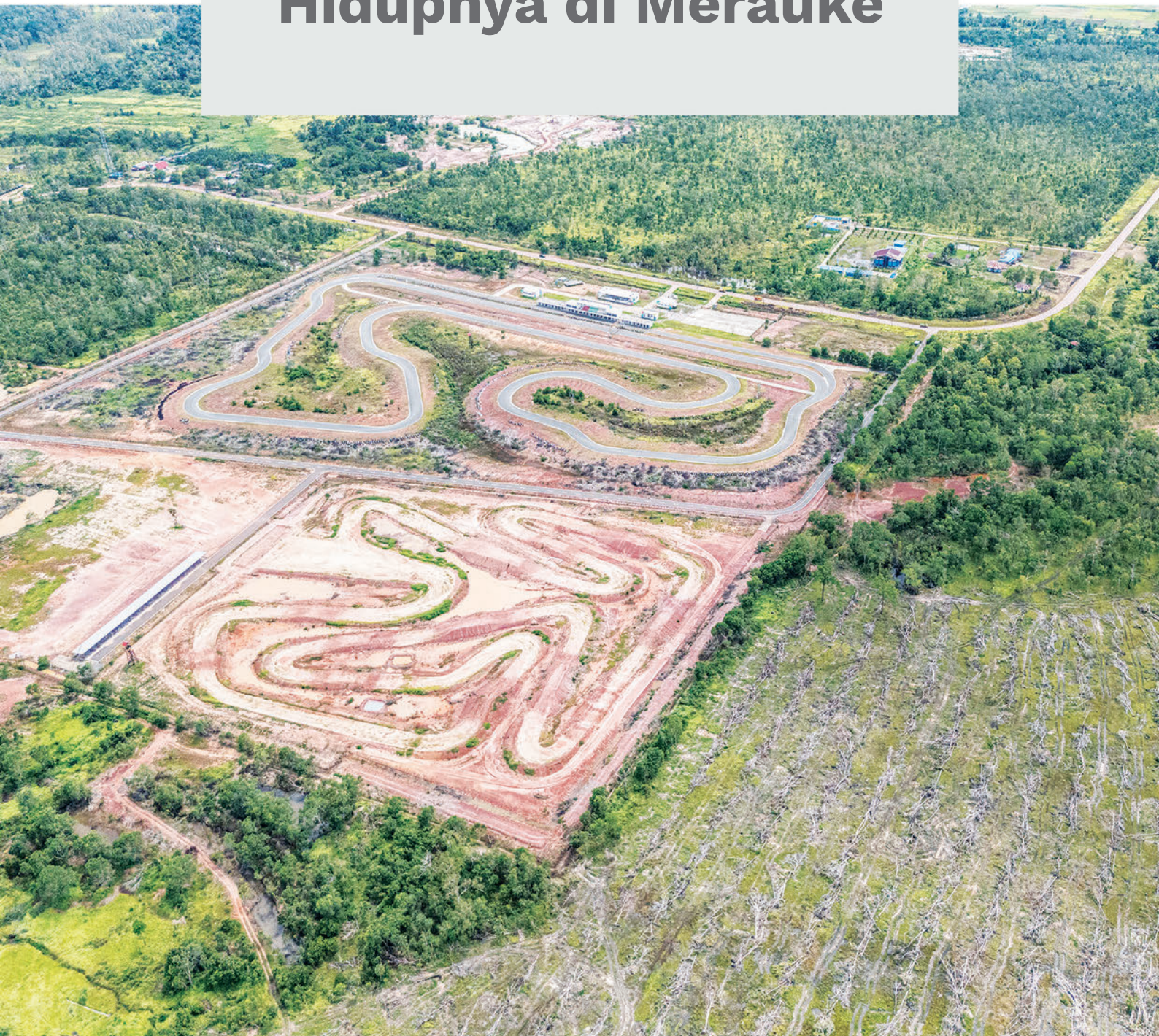


PSN dan Mereka yang Kehilangan Hidupnya di Merauke





Kampung Soa di Distrik Tanah Miring, Merauke, seolah menjadi wilayah yang tak kasatmata di mata pemerintah. Akses menuju kesana menjelma menjadi ujian fisik yang berat terlebih saat musim hujan tiba. Jalan berlumpur yang licin, memaksa kami bertarung dengan waktu hampir satu jam untuk menempuh jarak dua kilometer. Setiap langkah terasa berat, sepatu kami terbenam di tanah yang basah, membuat rute pendek itu terasa seperti perjalanan yang panjang. Kondisi ini sangat kontras dengan musim kemarau, ketika tanah mengeras dan kendaraan roda empat akhirnya bisa melintas.

Namun medan bukanlah hal tersulit dari perjalanan ini. Yang lebih berat adalah memahami kenyataan bahwa di ujung jalan itu, sebuah kehidupan sedang berubah, bukan karena pilihan, tetapi karena direnggut paksa oleh proyek-proyek berkedok strategis nasional.



Gambar 1. Kondisi jalan berlumpur menuju ke Kampung Soa, Distrik Tanah Miring, 14 Januari 2026.
Photo Satya Bumi

Air yang Tetap Dipakai, Meski Tak Lagi Aman

Di Kampung Soa, air adalah pusat kehidupan masyarakat. Sungai dan rawa-rawa di sekeliling kampung adalah sumber utama yang menyediakan air minum, tempat mandi, hingga sumber protein dari ikan dan berbagai biota air lainnya. Lebih dari itu, air adalah instrumen krusial dalam tradisi pangkur sagu, sebuah cara tradisional masyarakat mengolah makanan pokok mereka. Semua aktivitas ini bergantung pada air bersih dan layak konsumsi.

Namun kini, air itu berubah. Air yang mengalir ke kampung tidak lagi memperlihatkan rona jernih. Endapan sedimen tanah yang pekat terlihat jelas melayang di sepanjang aliran, diiringi bau lumpur menyengat yang jauh lebih kuat dari biasanya. Bagi masyarakat Kampung Soa, perubahan drastis ini adalah petaka.



Gambar 2. Seorang mama warga Kampung Soa, Distrik Tanah Miring sedang mengambil air dari sungai untuk dimasak, 14 Januari 2026. Photo Yusuf Wahil/Mighty Earth



Gambar 3. Anak-anak sedang bermain dan berenang di sungai yang keruh, Kampung Soa, 14 Januari 2026.
Photo Yusuf Wahil/Mighty Earth

Namun, berada di garis kemiskinan struktural membuat berhenti menggunakan air sungai bukanlah sebuah pilihan. Air yang telah terindikasi tercemar tersebut terpaksa tetap mereka tampung untuk memasak, diminum, dan memproses sagu.



Gambar 4. Aktivitas pangkur sagu oleh para mama di Kampung Soa, 19 Januari 2026.
Photo Yusuf Wahil/Mighty Earth

Di tepi sungai, para mama (ibu-ibu) Papua masih melakukan pangkur sagu seperti yang diajarkan turun-temurun selama puluhan tahun. Namun, ada yang berubah hari ini. Batang-batang sagu yang telah diparut halus, kini terpaksa diperas dan disaring menggunakan air sungai yang sama, namun kini telah berubah keruh.



Gambar 5. Kondisi air sungai yang keruh namun tetap dimanfaatkan oleh penduduk Kampung Soa untuk kebutuhan domestik sehari-hari. Hulu aliran sungai ini berada di dalam kawasan konsesi tebu PT Global Papua Abadi (GPA) dan bermuara langsung ke Sungai Maro, Kampung Soa, Distrik Tanah Miring, 24 Januari 2026. Photo Yusuf Wahil/Mighty Earth

Krisis Air Bersih yang Merembes ke Tubuh Anak

Yustina Kae menunjukkan kaki anak bungsunya. Di kulit bocah itu, tampak ruam-ruam merah yang meradang dan membengkak akibat iritasi.

“Dulu air ini bening,” ujar Yustina, matanya tak lepas dari aliran sungai yang kini keruh.

“Anak-anak mandi, main di rawa, tidak pernah sakit. Sekarang... kalau dong turun ke air, malamnya garuk terus sampai menangis. Sejak perusahaan datang buka tanah dua tahun yang lalu, air su [sudah] berubah, keruh.”



Gambar 6. Kondisi iritasi dan gatal pada kaki seorang anak di Kampung Soa, Distrik Tanah Miring, 19 Januari 2026. Photo Yusuf Wahil/Mighty Earth

Di wajah Yustina, kami membaca sebuah kecemasan yang jauh lebih besar ketimbang sekadar urusan penyakit kulit atau gatal-gatal. Ada ketakutan eksistensial yang nyata, yaitu ketakutan bahwa ruang hidup dan tanah adat yang selama ini mereka jaga dengan kearifan lokal, sedang direnggut paksa dan dirusak secara permanen oleh investasi yang tidak pernah mereka izinkan.

Apa yang dialami anak-anak di Kampung Soa adalah sebuah alarm keras bagi kemanusiaan. Krisis lingkungan akibat ambisi korporasi tidak pernah berhenti sebagai isu ekologis di atas kertas. Kerusakan itu juga memberikan dampak bagi kesehatan, meracuni sumber air dan makanan pokok, dan membalikkan tatanan kehidupan sehari-hari masyarakat adat yang dulunya damai.

Jejak Pembukaan Hutan yang Tak Bisa Disembunyikan

Tak jauh dari pemukiman di Kampung Soa, berjarak 3-4 km berdiri pelabuhan milik PT Global Papua Abadi. Dari titik ini, jejak pembukaan hutan terlihat jelas. Alat berat keluar masuk, tanah merah terbuka, dan pepohonan roboh. Sungai Maro diduga menjadi hilir dari limpasan aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan tebu dan proyek cetak sawah yang difasilitasi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke.

Julius Tenot, Tuan Dusun Kampung Soa, juga menegaskan aktivitas perusahaan kini sudah terasa sampai ke pemukiman.

“Suara alat berat tu torang dengar jelas dari sini. Pelabuhan juga sebentar lagi mau jalan. Kemarin ada kapal lewat di sungai ini, mau ke pelabuhan,” katanya sambil menunjuk ke arah pelabuhan milik PT GPA.

Ia juga bilang, kalau sungai sampai tercemar, kehidupan mereka akan terancam. Sungai yang dimaksud Julius Tenot adalah Sungai Maro, yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan memiliki peran penting sebagai penopang kehidupan sekaligus bagian dari sejarah panjang wilayah tersebut. Menariknya, nama "Merauke" sendiri lahir dari sebuah kesalahpahaman antara pendatang dan penduduk asli, di mana ucapan "Maro-ke" oleh warga setempat, yang sebenarnya merujuk pada sungai justru ditafsirkan oleh pendatang sebagai nama daerah tersebut.

“Kalau sungai rusak, torang mau cari ikan di mana, mau pangkur sagu di mana, mau ambil air minum di mana? Itu sama saja torang dibunuh pelan-pelan”

Julius Tenot juga menceritakan lahan miliknya yang telah diambil alih perusahaan, sementara wilayah berburu mereka semakin hilang seiring pembukaan hutan oleh PT GPA. Akibatnya, satwa buruan menjauh dari kawasan bekas hutan yang telah di babat. Untuk berburu, mereka kini harus berjalan jauh, bahkan hingga melewati perbatasan Papua Nugini, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Kadang torang harus kesana (Papua Nugini) baru dapat buruan. Disini sudah susah”

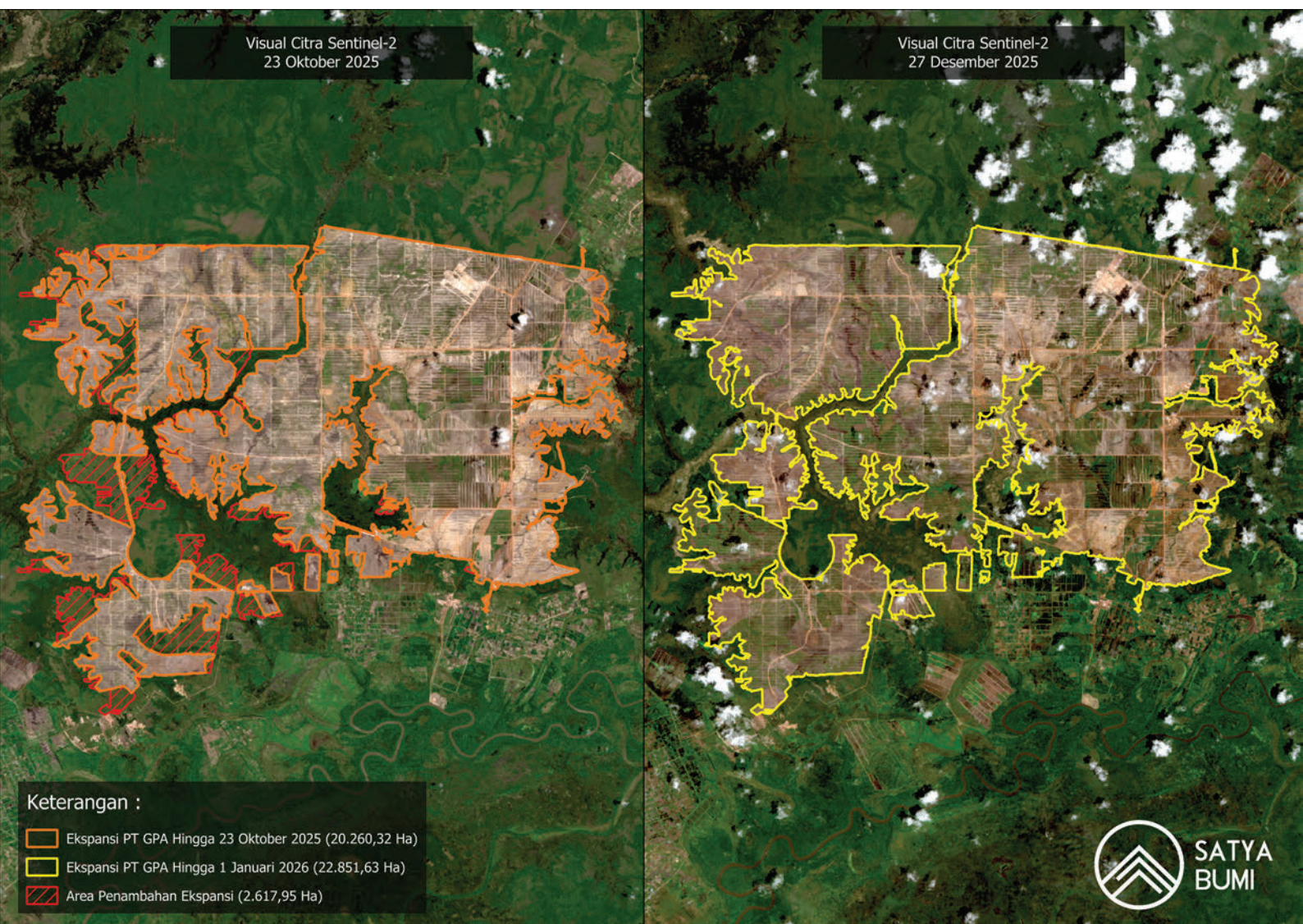


Gambar 7. Pelabuhan milik PT Global Papua Abadi yang dibangun di tepi Sungai Maro yang digunakan sebagai jalur transportasi logistik, Kampung Soa, Distrik Tanah Miring, 19 Januari 2026.

Photo Yusuf Wahil/Mighty Earth

Deforestasi yang Terjadi di Konsesi PT Global Papua Abadi

Di balik narasi pengembangan industri gula nasional, ekspansi lahan dalam skala besar juga membawa konsekuensi ekologis yang signifikan. Berdasarkan hasil pemantauan Satya Bumi menggunakan citra satelit Sentinel-2, PT Global Papua Abadi (GPA) tercatat telah membuka hutan seluas 8.646,94 hektare hingga 1 Januari 2026. Angka ini menunjukkan **peningkatan sekitar 6,8%** atau mendekati 600 hektare dibandingkan periode pemantauan sebelumnya pada 23 Oktober 2025 yang terpantau masih berada di angka 8.089 hektare. Tren ini mengindikasikan bahwa pembukaan lahan masih terus berlangsung dan berpotensi meluas seiring percepatan pembangunan proyek. Sebagai catatan, PT GPA hingga hari ini telah menguasai lahan seluas 22,8 ribu hektare di Distrik Tanah Miring untuk perkebunan tebu.



Gambar 8. Peta deforestasi PT Global Papua Abadi per 1 Januari 2026. Sumber: diolah oleh Satya Bumi



Gambar 9. Pembukaan lahan di konsesi PT Global Papua Abadi tampak sisa-sisa kayu yang dibiarkan menumpuk di sisi jalan, Distrik Tanah Miring, 16 Januari 2026. Photo: Yusuf Wahil/Mighty Earth

Sepanjang perjalanan melintasi kawasan tersebut, kami disuguhi oleh potret pembukaan hutan (*land clearing*) dalam skala yang sangat masif di dalam area konsesi PT Global Papua Abadi (GPA). Namun, dibalik hamparan lahan yang telah digunduli tersebut, kami menemukan satu lagi keganjilan yang mencolok.

Temuan lapangan ini memperlihatkan anomali bagi siapa saja yang memahami karakteristik agraria. Ada kontradiksi nyata ketika proyek ambisius penanaman tebu skala masif ini justru dipaksakan berjalan di atas bentang lahan basah yang terus-menerus tergenang air. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kawasan rawa ini kemungkinan besar menyimpan rencana alih fungsi lain demi kepentingan industri.

Secara teknis budidaya, tebu membutuhkan drainase tanah yang baik dan tidak dapat tumbuh optimal di lahan yang terendam air secara permanen. Menjadi sangat aneh dan sarat kejanggalan ketika ekosistem rawa yang sensitif seperti ini justru dengan sengaja dimasukkan ke dalam peta konsesi inti PT GPA.



Gambar 10. Ekskavator sedang beroperasi di dalam area konsesi PT GPA, 18 Januari 2026. Photo: Yusuf Wahil/Mighty Earth

Di tengah kebingungan atas tata ruang tersebut, mesin-mesin perusak hutan terus bekerja tanpa henti. Kami menyaksikan langsung alat berat yang tengah beroperasi aktif seperti sedang menggemburkan tanah.

Dinamika industri ini terasa begitu agresif. Di sepanjang jalan yang kami lalui, sejumlah trailer pengangkut alat berat hilir mudik membawa muatan ekskavator baru untuk didistribusikan ke berbagai titik pembukaan lahan. Deru mesin dan mobilitas alat-alat berat ini seolah menegaskan bahwa laju ekspansi korporasi tidak akan melambat, terlepas dari apapun dampak lingkungan dan kegagalan lahan yang ada di hadapan mereka.



Gambar 11. Sejumlah trailer pengangkut alat berat tampak sepanjang perjalanan, mengangkut ekskavator yang digunakan dalam kegiatan pembukaan lahan, Kampung Yamabaru, Distrik Tanah Miring, 27 Januari 2026. Photo Yusuf Wahil/Mighty Earth

Kolonialisme Gaya Baru Atas Nama Pembangunan

Masyarakat adat Malind kini harus menghadapi kenyataan pahit. Di atas tanah ulayat milik mereka sendiri, kedaulatan pangan dan sumber penghidupan justru perlahan-lahan dirampas. Ironi ini terasa ketika warga asli terpaksa melintasi batas negara ke Papua Nugini demi menyambung hidup dan mencari pemenuhan pangan yang kian langka di tanah kelahiran mereka sendiri.

Situasi ini mencerminkan bentuk penguasaan sumber daya yang menyerupai praktik kolonialisme masa lalu, namun dilegalkan melalui instrumen kebijakan pembangunan nasional.

Apa yang terjadi di Kampung Soa memperlihatkan kontradiksi dari narasi bahwa PSN Merauke digadang-gadang sebagai solusi untuk ketahanan pangan dan energi nasional. Namun bagi masyarakat yang mendiami episentrum proyek, mega proyek ini justru bertindak sebagai mesin pelumat sumber pangan lokal mereka sendiri. Sagu, yang selama ini menjadi makanan pokok mereka semakin sulit ditemukan. Ikan-ikan di sungai menghilang, sementara air bersih yang mengalir telah menjelma menjadi ancaman kesehatan.

Di atas kehancuran pangan lokal tersebut, sejenis tanaman non-asli Papua seperti tebu dipaksa tumbuh dalam skala monokultur yang masif, didukung penuh oleh gelontoran investasi dan percepatan infrastruktur penunjang. Pergeseran dari hutan alami ke perkebunan monokultur juga melepaskan cadangan karbon raksasa yang tersimpan di hutan, yang justru mempercepat krisis iklim global.

Proyek ini menimbulkan pertanyaan besar: **“Pangan dan energi ini sebenarnya diproduksi untuk siapa?”**. Ketika rahim bumi dieksploitasi hingga masyarakat lokal kehilangan kedaulatan atas pangan tradisionalnya, maka frasa “ketahanan pangan” yang dijanjikan proyek ini seketika luruh, menjadi sebuah janji kosong yang kehilangan makna moralnya.

Regulasi Kilat dan Pengabaian Kedaulatan Hukum

Pada tataran kebijakan, di balik ekspansi alat berat di lapangan, megaprojek ini ditopang oleh percepatan regulasi di tingkat pusat. Pada 18 September 2025, Kementerian Kehutanan menerbitkan SK Nomor 591 Tahun 2025 yang mengubah peruntukan kawasan hutan seluas 486,94 ribu hektare di Merauke, Mappi, dan Boven Digoel. Kebijakan ini melanjutkan langkah sebelumnya melalui SK Menteri LHK Nomor 835 Tahun 2024 yang melepaskan sekitar 13.540 hektare kawasan hutan untuk pembangunan sarana ketahanan pangan.

Sejumlah pakar hukum agraria menilai kebijakan ini berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua karena mengabaikan hak ulayat masyarakat adat yang dijamin konstitusi. Seluruh proses juga berlangsung tanpa konsultasi publik yang bermakna maupun penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), sehingga pembangunan berjalan tanpa persetujuan sah dari masyarakat terdampak.

Situasi ini diperparah oleh narasi pejabat yang menyebut wilayah tersebut sebagai “tanah negara” yang kosong. Pandangan tersebut mengabaikan fakta bahwa kawasan itu merupakan ruang hidup masyarakat adat dan mencerminkan cara pandang lama yang meminggirkan hak-hak mereka atas tanah.

Apa yang terjadi di Kampung Soa menunjukkan kontradiksi pembangunan nasional. Proyek yang diklaim memperkuat ketahanan pangan dan energi justru mengorbankan masyarakat adat melalui perampasan tanah, pencemaran sumber air, dan hilangnya sumber pangan lokal.

Pada akhirnya, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa hilangnya hutan, tetapi juga runtuhnya tatanan kehidupan masyarakat adat: lenyapnya cara hidup, pengetahuan lokal, dan masa depan generasi yang selama ini menjaga bentang alam Papua.



